**TEMBAK DI TEMPAT OLEH ANGGOTA DENSUS 88 TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DIKAITKAN DENGAN
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PELAKU**

Oleh : YURIADI

Pembimbing Dr.Erdianto.S.H,M.Hum & Dr.Mexasai Indra.S.H.,M.H

Alamat :Jln.Mangga.No5 Sukajadi

Email :yowmovic@gmail.com

ABSTRACT

Terrorism, including the category of extraordinary crimes, would require extraordinary measures. Thus the birth of terrorism legislation is not separated from the emergence of the pros and cons. Pros and cons occur because of differences in the starting point of looking at terrorism with the issuance of terrorism legislation. On one side of the counter is based on a view of human rights protection actors (Offender oriented), while the other side of the starting point based on a pro-human rights approach to the protection of the victim (victim oriented).

Keywords: *Setup - Shoot in place - Terrorist*

A. Pendahuluan

Terorisme menjadi persoalan serius dalam Negara, kemudian definisi terorisme dimasukkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut. Dalam Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dapat dilihat rumusan sebagai berikut :¹

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas

kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Terorisme termasuk kategori *extra ordinary crimes*, tentu membutuhkan *extra ordinary measures*. Sehingga kelahiran undang-undang terorisme ini tidak lepas dari munculnya pro dan kontra.² Pro dan kontra terjadi karena adanya perbedaan titik tolak dalam memandang terorisme dengan

¹ Indriyanto Seno Adji..*Terorisme*, "Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana" dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia.Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.2001.hal 34

² *Ibid* .hal 35

dikeluarkannya undang-undang terorisme. Di satu sisi kelompok kontra didasarkan pandangan pada perlindungan Hak Asasi Manusia pelaku (*offender oriented*), sedangkan sisi lain titik tolak kelompok pro didasarkan pada pendekatan perlindungan Hak Asasi Manusia korban (*victim oriented*).

Penyelesaian tindak pidana terorisme negara secara nyata telah membentuk suatu langkah serius untuk memberantas tindak pidana terorisme, yakni dengan membentuk suatu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri yang bertugas memberantas terorisme di Indonesia berdasarkan dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu dengan kewenangan melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun, selama 7 x 24 jam (sesuai pasal 26 & 28). Undang-undang tersebut populer di dunia sebagai "*Anti-Terrorism Act*".³

Menggunakan dasar hukum tersebut Densus 88 Anti Teror Mabes Polri mempunyai wewenang untuk melakukan pemberantasan terhadap Teroris. Dalam praktiknya pemberantasan terorisme tidaklah sama dengan pemberantasan tindak pidana biasa, banyak praktik yang melenceng dari penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.⁴ Maka dari itu selain ada

dasar hukum dalam pembentukan ada juga alasan penghapusan pidana bagi anggota Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang dalam praktiknya kadang melakukan pelanggaran seperti terpaksa melakukan tembak di tempat terhadap terduga terorisme. Dalam kajian hukum pidana ada asas umum yang harus ada terkait hak tersangka dimata hukum termasuk *presumption of innocence* (Praduga Tak Bersalah), yakni sebelum ada putusan pengadilan seseorang masih dinyatakan tidak bersalah termasuk masih dijunjung Hak Asasi Manusia.⁵

Serangkaian penggerebekan Tindak Pidana terorisme di Indonesia bermula pada 9 November 2005 Detasemen 88 Mabes Polri menyerbu kediaman buronan teroris Dr. Azahari di Kota Batu, Jawa Timur yang menyebabkan tewasnya buronan nomor satu di Indonesia dan Malaysia tersebut. Lalu, 2 Januari 2007 - Detasemen 88 terlibat dalam operasi penangkapan 19 dari 29 orang warga Poso yang masuk dalam daftar pencarian orang di Kecamatan Poso Kota. Tembak menembak antara polisi dan warga pada peristiwa tersebut menewaskan seorang polisi dan sembilan warga sipil. Kemudian pada 9 Juni 2007 Yusron Mahmudi alias Abu Dujana, tersangka jaringan teroris kelompok Al Jamaah Al Islamiyah, ditangkap di desa Kebarongan, Kemranjen, Banyumas, Jateng.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk

³ Bambang Abimanyu, *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 2005.hal .71

⁴ *Ibid.* hal 73.

⁵ M Fall, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Praduya Pramita, Jakarta, 1991.hal. 32

menuangkannya ke dalam proposal skripsi dengan judul : *“Tembak Di Tempat Oleh Anggota Densus 88 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana terorisme?
2. Apakah alasan penembakan Densus 88 anti teror dalam melakukan tembak ditempat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
3. Apakah tembak di tempat yang dilakukan anggota Densus 88 terhadap mereka yang diduga teroris bertentangan dengan Hak Asasi Manusia pelaku?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana terorisme?
2. Untuk mengetahui alasan penembakan Densus 88 anti teror dalam melakukan tembak ditempat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
3. Untuk mengetahui tembak di tempat yang dilakukan anggota Densus 88 terhadap mereka yang diduga teroris bertentangan dengan Hak Asasi Manusia pelaku?

2) Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti;
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi Kepolisian;
3. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan

mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan pengaturan tembak di tempat oleh anggota kepolisian terhadap pelaku tindak pidana.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana dianalogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁶

etahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :⁷

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

Sungguhpun diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana diatas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekwensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat di hukum kecuali ditentukan di dalam undang-undang

2. Teori Kewenangan

⁶ E. Y. Kanterdan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 208.

⁷ *Ibid*, hal. 54.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁸ J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen.⁹ Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat

⁸ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, 1994, Bandung, hal. 65.

⁹ J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibris, 1998, hal. 16-17.

(organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.¹⁰

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita-cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :¹¹

1) Faktor hukumnya sendiri

Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya. Artinya peraturan perundang-undangan yang tidak

¹⁰ F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 219.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 55.

kelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam masyarakat.

2) Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum

3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Artinya, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup yang merupakan kebutuhan praktisi yang berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti dalam masalah pelanggaran tindak pidana.

4) Faktor masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Yaitu, mengenai partisipasi atau peran serta baik oleh masyarakat itu sendiri.

5) Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Artinya, kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar daripada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

E. Kerangka Konseptual

1. Tembak Di Tempat Tembak ditempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media masa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu tindakannya berupa tembakan terhadap tersangka.¹²

2. Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Pasukan khusus berompi merah ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom.¹³

3. Pelaku tindak pidana adalah orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan baik itu merupakan unsur subjektif maupun objektif tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena diggerakkan oleh pihak ketiga.¹⁴

F. Metode Penelitian

1) Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-perundangan dan putusan pengadilan. Dalam hubungan ini dilakukan pengukuran peninjauan hukum pengaturan tembak di tempat

¹² M Fall, *Op.Cit*, hal 43

¹³ Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan dan Tata Organisasi Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Indonesia

¹⁴ <http://putranto88.blogspot.com/2011/pelaku.html?m=1>

yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap pelaku tindak pidana.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan bersifat menggambarkan hasil penelitian tersebut. Atau penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum terkait tembak di tempat.¹⁵

2) Metode dan Alat Pengumpul Bahan Hukum

Pengumpulan data berupa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau bahan sekunder untuk mendapatkan konsep teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek yang diteliti yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah. Data Sekunder pada umumnya dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakandengan segera.¹⁶ Menurut Soejono Soekanto data sekunder dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian :¹⁷

1. Bahan Hukum Primer

¹⁵ Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal, 41-42.

¹⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 1984 , hal. 12.

¹⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2006, hal. 23.

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari undang-undang antara lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Data yang penulis peroleh dari kamus ensiklopedia dan Internet atau media cetak lainnya yang dapat menunjang kesempurnaan dalam penelitian ini.

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpul data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Dalam hal ini seorang peneliti harus dan tepat untuk pengumpul data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4) Analisis Data

Analisis permasalahan dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun secara lisan dan perilaku nyata.

Sebagai langkah akhir analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

F. PENGATURAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

1. Aturan Hukum Tentang Tembak Mati Terhadap Pelaku Terorisme
 - a. Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

Pasal 48 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan karena adanya daya paksa (*Overmacht*) tidak dipidana. Adanya daya paksa itulah yang menyebabkan anggota Kepolisian Republik Indonesia menggunakan kekuatan dengan senjata api. Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*), yang rumusnya menyebutkan barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

Dalam pasal 50 KUHP yang menyatakan barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh di hukum, menjalankan undang-undang artinya tidak hanya terbatas melakukan perbuatan yang diatur undang undang akan tetapi dapat lebih luas lagi ialah meliputi pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang. Polisi yang menembak mati dalam proses penangkapan harus dilihat

apakah seimbang apa tidak dalam hal penggunaan senjata api.¹⁸ Serta dalam pasal 51 KUHP ayat (1) yang menyatakan barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 7 ayat (1) angka 10 menentukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Tindakan lain yang dimaksud dalam angka 10 pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah termasuk melakukan tembak mati di tempat pada orang yang di duga atau tersangka yang terkait dalam suatu tindak pidana termasuk kejahatan terorisme. Upaya tembak mati ialah tindakan lain dalam melaksanakan tugasnya yang dilakukan dalam hal sebagai upaya terakhir untuk menghindarkan orang yang di duga atau tersangka tersebut melarikan diri maupun melakukan perlawanan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia.

- b. Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

Dasar hukum diskresi bagi petugas kepolisian negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a) Pasal 15 ayat (2) huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai

¹⁸ *Ibid*, hlm 66.

dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;

- b) Pasal 16 ayat (1) huruf 1 : Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- c) Pasal 18 ayat (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan Perundangundangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Petunjuk Pelaksana (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Kepolisian Republik Indonesia

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisan ada beberapa prinsip dasar yang menjadi dasar penggunaan senjata api. Penggunaan senjata api dalam melakukan tindakan preventif maupun kekerasan yang dalam proses penegakan hukum tetap dalam koridor batas yang di tetapkan dan tetap harus berpatok pada peraturan yang berada di atasnya. Sebelum petugas kepolisian melakukan tindakan kekerasan kepolisian berupa tembak ditempat, sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian harus melakukan tindakan tembakan peringatan terlebih dahulu. Sebelum melakukan penembakan peringatan terlebih dahulu anggota Kepolisian Republik harus melalui tahapan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yakni tahapan penggunaan senjata api harus di dahului dapat diikuti dengan komunikasi lisan atau ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian pada Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika:

- a) Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat
- b) Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c) Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman

segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Serta dalam ayat (2) yang menyebutkan penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Dalam hal pelaksanaan tembak di tempat, ada standard prosedur (SOP) yang dijadikan petunjuk lapangan penggunaan senjata api bagi anggota Polri.¹⁹

1. Keadaan yang mengijinkan penggunaan senjata api.
2. Presedur penggunaan senjata api.
3. Setelah Penggunaan Senjata Api

Mengenai aturan tembak mati juga dapat dilihat dalam tentang Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Penggunaan senjata api dalam Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia dalam ayat (1) menyatakan bahwa Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia dan dalam ayat (2) menyatakan senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:

- a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;

- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

G. ALASAN PENEMBAKAN DENSUS 88 ANTI TEROR DALAM MELAKUKAN TEMBAK DITEMPAT SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Berbagai kewenangan Densus 88 dalam penanggulangan tindak pidana teroris di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya :

1. Kewenangan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Wewenang Secara Umum Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, menyebutkan:²⁰

- 1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

¹⁹ <http://polri.go.id/standar-universal-penggunaan-senjata-api-pada-penegak-hukum>

²⁰ Pasal 15 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lainnya, serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- Densus 88 dari struktur organisasinya memiliki empat pilar pendukung operasional setingkat sub-detasemen dan disetiap sub-den terdapat unit-unit yang menjadi pondasi pendukung bagi operasional Densus 88, dimana setiap sub-detasemen dan unit-unit tersebut memiliki wewenang dan tugasnya masing-masing.²¹
2. Kewenangan Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

²¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori Dan Praktek*, Jakarta: 2012, hlm. 69

Penyidik (Densus 88) dalam hal jangka waktu penangkapan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 19 Ayat (1) mengatur tentang jangka waktu penangkapan dilakukan paling lama satu hari (1 x 24 jam) di perpanjang menjadi satu minggu atau (7 x 24 jam). Tujuan dilakukannya peangkapan tentu saja adalah demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Penahanan diatur dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003, menyebutkan “Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.”²²

Jangka waktu penahanan dalam proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum sampai 40 (empat puluh) hari, maka jangka waktu penahanan selama proses penyidikan adalah 60 hari dan penahanan selama proses penuntutan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri hingga 30 (tiga puluh) hari, jadi jumlah penahanan selama proses penuntutan adalah 50 hari sehinggah total jangka waktu

²² Pasal 25 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang .

penahanan selama proses penyidikan dan penuntutan adalah 110 (seratus sepuluh) hari. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jangka waktu penahanan adalah 6 (enam) bulan yang artinya 180 (seratus delapan puluh) hari. Penggunaan Laporan Intelejen diatur dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyebutkan:²³ “untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelejen.”

Perluasan Alat Bukti diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Ketentuan ini memberikan wewenang yang lebih luas kepada penyidik yang adalah Densus 88 dalam hal alat bukti. Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan alat bukti hanyalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, namun dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 alat bukti diperluas dengan bukti elektronik bahkan gambar, peta, suara, foto atau sejenisnya.

3. Tindakan Tim Densus 88 Ditinjau Dari Hukum Pidana

Hukum pidana kita mengenal adanya alasan penghapus pidana (*Straffslutinggroundent*) yang dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 44, 45, 48-51 KUHP. Alasan penghapus pidana (*Straffslutinggroundent*) ini menurut

²³ Pasal 26 Ayat (1), Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

para ahli dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, namun dalam penggolongan ini masih tidak menemukan pandangan yang sama dalam hal penggolongan tersebut. Tentang Daya Paksa (*Overmacht*). Pasal 48 berbunyi, “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”²⁴

Densus 88 dalam tindakannya dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme selalu dihadapkan dengan masalah daya paksa seperti ini, misalnya pada saat penyeragaman terduga atau tersangka teroris maka sering terjadi aksi baku tembak antara teroris dan Densus 88 akibatnya merusak barang dan bangunan yang ada disekitar lokasi bahkan memakan nyawa. Namun dalam hal ini Densus 88 digerakkan dengan daya paksa dan dalam keadaan darurat. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain melawan para teroris karena hal ini berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak dan keamanan umum, bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

H. TEMBAK DI TEMPAT YANG DILAKUKAN ANGGOTA DENSUS 88 TERHADAP MEREKA YANG DIDUGA TERORIS BERTENTANGAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA PELAKU

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya

²⁴ Pasal 48 , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁵ Hak asasi manusia memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya bagi setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul kebangsaan, umur kelas agama atau keyakinan politik, bahkan hak-hak tersebut perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, bahkan setiap orang. Namun kebebasan yang diberikan dalam hak asasi manusia ini dalam pelaksanaannya dibatasi oleh beberapa hal yaitu hak orang lain seperti yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahkan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Hak Asasi Manusia (HAM), penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 itu jelas melanggar HAM, apabila sistem kerja yang digunakan tidak dirubah. Karena Densus 88 cenderung menggunakan cara represif dalam menangani beberapa kasus dugaan tindak pidana terorisme ataupun tembak ditempat, yang belum tentu korban tembak ditempat itu adalah salah satu jaringan terorisme.

HAM juga menyarankan kepada penegak hukum untuk

menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya, apabila seorang tersangka sebagai jaringan terorisme, maka orang tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, tidak boleh dengan cara menghakimi sendiri ataupun mengadili dengan cara yang tidak benar, apalagi dengan cara kekerasan.

Realita empiriknya pemberantasan kejahatan terorisme yang dilakukan oleh densus 88 masih jauh dari nilai-nilai HAM karena dalam penegakannya seringkali aparat penegak hukum, khususnya detasemen khusus (densus 88) anti teror melakukan tindakan represif yang membahayakan HAM seseorang, dalam beberapa operasi banyak dilakukan kekerasan bahkan penembakan mati kepada orang yang disangka ataubahkan baru diduga melakukan tindak pidana terorisme.

Keberadaan Densus 88 merupakan jawaban dari kebutuhan akan adanya unit khusus yang memiliki kewenangan utama dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dan peran yang melekat pada Densus 88 ini sesungguhnya mempertegas komitmen Polri, dan pemerintah Indonesia dalam berperan aktif dalam Perang Global melawan Terorisme. Sepanjang empat tahun sejak terbentuknya, peran dan fungsi Densus 88, tidak saja mengharumkan nama kepolisian, tapi juga nama negara didunia internasional. Dan memperluas keorganisasian Densus 88 hingga ke tingkat daerah menjadi penegas bahwa komitmen Polri

²⁵ Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dalam memberantas tindak pidana terorisme tidak main-main.

I. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Aturan mengenai tembak mati ditempat pada kejahatan terorisme secara hukum dapat dilihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian; dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Alasan penembakan Densus 88 anti teror dalam melakukan tembak ditempat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena melakukan tindakan perintah undang-undang, dimana mengenai kewenangan tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berisikan wewenang-wewenang Densus 88.
- 3) Realita pemberantasan kejahatan terorisme yang dilakukan oleh densus 88 masih jauh dari nilai-nilai HAM karena dalam penegakannya seringkali aparat penegak hukum,

khususnya detasemen khusus (densus 88) anti teror melakukan tindakan represif yang membahayakan HAM seseorang, dalam beberapa operasi banyak dilakukan kekerasan bahkan penembakan mati kepada orang yang disangka ataubahkan baru diduga melakukan tindak pidana terorisme.

2. Saran

- 1) Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam konstitusi tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, jadi segala sesuatu harus diatur dengan hukum karena merupakan salah satu unsur dari negara hukum..
- 2) Perlu adanya pembaharuan terhadap peraturan yang mengatur terkait tindak pidana terorisme dan kewenangan tembak di tempat yang dilakukan oleh densus 88.
- 3) Penanggulangan serta pemberantasan tindak pidana terorisme oleh Tim Densus 88 telah diatur dalam instrument hukum Negara Indonesia. Meskipun demikian, densus 88 harus tetap memperhatikan aspek-aspek Hak Asasi Manusia.

J. Daftar Pustaka

1. Buku

Ali, Mahrus, 2012, Hukum Pidana Terorisme Teori Dan Praktek, Jakarta.

Abimanyu, Bambang , 2005, *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo, Jakarta.

Brouwer, J.G. dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibrari.

Fall, M, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Praduya Pramita, Jakarta.

Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Seno Adji, Indriyanto, *Terorisme*, 2001, "Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana" dalam *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.

S. R. Sianturi, E. Y. Kanterdan, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Stroink, F.A.M. dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta.

Soekanto, Soejono dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 26 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan dan Tata Organisasi Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

3. Website

<http://polri.go.id/standar-universal-penggunaan-senjata-api-pada-penegak-hukum>

<http://putranto88.blogspot.com/2011/pelaku.html?m=1>